

TUNTUTAN KUALITAS PROFESIONALISME POLRI MENGHADAPI TANTANGAN TUGAS PADA ABAD XXI

Oleh: Drs. Chaeruddin Ismail

PENDAHULUAN

Memperkirakan tantangan tugas Polri pada Abad XXI, tentunya tidak terlepas dari perkembangan lingkungan strategis baik yang berskala nasional, regional maupun global. Dunia dewasa ini sudah memasuki era globalisasi dan era informasi. Pengaruh era itu telah terasa di segenap segi kehidupan kita dalam masyarakat. Bahkan pengaruh negatif telah melanda perekonomian kita hanya dalam waktu kurang dari satu tahun telah membawa akibat ambruknya ekonomi yang telah dibangun lebih kurang 30 tahun ini. Kita masih berada di tengah-tengah krisis moneter, yang akan berimplikasi pada gejolak sosial yang mengancam stabilitas Kamtibmas, serta dampak-dampak ikutan lainnya. Sementara pemerintah dan pakar-pakar ekonomi bergulat menemukan solusi, Polri bergulat untuk bertahan agar rasa tidak puas kelompok mahasiswa, tekanan-tekanan kemiskinan karena di PHK dan gagalnya panen bersatu dan akumulasi dalam bentuk-bentuk kriminalitas yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Mencermati perkembangan masyarakat tersebut di atas, Polri sebagai agen penegak hukum dan Binkamtibmas, untuk dapat melaksanakan perannya dengan baik di masa datang, diperlukan kualitas profesionalisme Polri yang memadai. Oleh karenanya, judul yang saya kemukakan dalam artikel ini adalah: *"Tuntutan kualitas profesionalisme Polri menghadapi tantangan tugas pada abad XXI"*; akan mencakup tantangan tugas Polri pada abad ke-21; yang dikristalisasi dari perkembangan lingkungan strategis baik dalam skala nasional, regional maupun global; konsepsi tugas, fungsi dan peranan Polri yang bersumber dari landasan nilai-nilai yang masih relevan namun perlu diorientasikan pada perkembangan masyarakat pada era tersebut; kemudian dicoba mengemukakan kualitas profesionalisme dan kejujuran Polri yang relevan dan kontekstual yang diperlukan guna menjamin tegaknya hukum dan ketertiban serta memelihara ketentraman masyarakat yang dinamis.

Sudah barang tentu bahasan saya akan lebih bersifat fragmatis dengan acuan pengalaman sesuai dengan jabatan saya selaku Kepala Kepolisian

Daerah yang selain bertanggung jawab atas pemeliharaan stabilitas Kamtibmas bagi terselenggaranya pembangunan di daerah; juga mensosialisasi *perwira-perwira senior* Polri yang handal untuk merespon setiap perkembangan masyarakat yang mengarah pada gejolak sosial yang merugikan masyarakat.

Mudah-mudahan masukan ini akan membuka pikiran dan meluaskan wawasan para perwira dalam membekali diri untuk tugas-tugas di masa mendatang.

Pemahaman Sosok Polisi

Sebelum menguraikan tangan tugas yang dihadapi Polri pada Abad XXI, perlu dibahas secara singkat mengenai sosok polisi yang seringkali terabaikan untuk dipahami baik oleh warga masyarakat maupun oleh polisi sendiri. Dengan pemahaman ini, diharapkan akan lebih kontras kita merumuskan kualitas profesionalisme dan jiwa kejuangan yang dituntut sesuai tantangan tugas pada masa mendatang.

Polisi adalah manusia penting dalam peradaban kita yang kompleks ini. Ada anggapan yang populer bahwa ia hanya berurusan dengan pencoleng dan hampir tidak mempunyai tugas yang lain. Anggapan semacam itu sama sekali tidak benar. Tindakan hukum yang berkaitan dengan kriminal hanyalah sebahagian kecil dari tugasnya. Dia terutama bertugas mengelola rakyat dalam kehidupan bermasyarakat, dan keba-

nyakan dari mereka itu adalah rakyat yang baik. Bagaimana cara menanganinya tugas ini, akan banyak menentukan kredibilitas dan reputasinya sebagai seorang petugas.

Salah pengertian lain ialah menyangkut tugas pokok dan fungsinya. Kebanyakan anggota polisi tidak memahami bahwa tanggung jawab utamanya adalah *pencegahan* dan bukannya *membuka* atau *memperbesar* persoalan. Pengalaman membuktikan bahwa banyak peristiwa menjadi serius oleh kekeliruan pertimbangan petugas polisi. Sikap arif bijaksana mutlak diperlukan untuk pelaksanaan tugas polisi secara benar; yang lebih penting dari pada pemahaman dan ketrampilan teknik. (Eliah Adlow: 1947).

Pemolisian (*policing*) di negara demokratis merupakan pekerjaan yang sarat dilemma. Betapa tidak, kepolisian yang diserahkan tanggung jawab sebagai penegak hukum, penertib, pelindung dan pengayom serta pelayan masyarakat mudah menggelincir pada *kesan pengusik, penindas* dan *majikan* terhadap masyarakat. Karenanya, pembinaan kepolisian untuk meningkatkan pelaksanaan tugas-tugas di bidang pelayanan masyarakat, mutlak diperlukan dalam konteks meluruskan dan memperkecil suasana dilemma tadi yang ditopang oleh perilaku yang arif dan bijak seorang petugas.

Di dalam era globalisasi dan era informasi yang semakin terasa pengaruhnya dewasa ini, perkembangan

kriminalitas baik yang *konvensional* (conventional crime) maupun yang *berdimensi baru* (new dimension of crime) serta *jenis-jenis kejahatan baru* (new types of crime) semakin meluas. Masalah-masalah lalu-lintas-pun semakin pelik. Masalah-masalah ketertiban umum serta bencana semakin terabaikan. Sementara itu, isu *keterbukaan, demokratisasi* dan *hak azasi manusia* semakin mengemuka. Kesemuanya ini menuntut peningkatan kemampuan profesional dan integritas kepribadian petugas polisi; yang bermuara pada *kredibilitas* dan *reputasi* kepolisian secara keseluruhan.

Karenanya kualitas profesionalisme dan kejuangan Polri tidak bisa dilepaskan dengan piranti-piranti yang mendukungnya, yaitu: *kekuatan* yang tergelar, kemampuan yang tersedia baik teknik, taktik maupun strategi, *dasar hukum* yang mengendalikan organisasinya, *kewenangan-kewenangan* yang diberikan oleh undang-undang dan segenap pembatasannya/pengendaliannya, serta *wibawa* yang dibangun di atas *reputasi* dan *kredibilitas* unit-unit kerja Polri secara memadai.

Topik yang dibahas ini melibat ruang lingkup yang amat luas, yang tidak mungkin dijelaskan secara langsung dalam artikel yang terbatas ini, sehingga perlu dibatasi hanya pada tuntutan kualitas profesionalisme dan kejuangan perwira senior Polri. Hal ini disebabkan oleh pengalaman bahwa kualitas perwira

senior sangat menentukan kinerja suatu unit kerja Polri. Dalam artian, suatu unit kerja yang dipimpin oleh perwira senior yang berkualitas tinggi mampu mewarnai penampilan organisasinya sekalipun diawaki oleh personil yang berkualitas pas-pasan.

Demikian pula sebaliknya, unit kerja yang personilnya berkualitas tinggi seringkali berpenampilan rendah di tangan perwira senior yang kurang berkualitas.

Tantangan Tugas Polri pada Abad XXI

Globalisasi dan era informasi yang melanda dunia telah meningkatkan desakan isu *keterbukaan, demokratisasi* dan *HAM* di dalam kehidupan masyarakat. Sejak beberapa tahun yang lalu, isu keterbukaan, demokratisasi dan HAM semakin gencar dikumandangkan oleh LSM-LSM yang tumbuh bagai jamur di musim hujan. Dengan dukungan oleh LSM-LSM dari luar negeri, kegiatan-kegiatan kelompok ini semakin intens dan meluas, menyentuh lapisan-lapisan masyarakat yang paling bawah. Bantuan-bantuan advokasi manajemen dan hukum diberikan pada berbagai permasalahan seperti pertanahan, perburuhan dan lingkungan hidup, seringkali menjadi masalah yang serius bagi pemerintah dan penegak hukum; yang lebih mengedepankan penyelesaian yang bersifat konfrontatif dari pada melalui saluran hukum yang benar. Masyarakat lak-sana diajak untuk selalu curiga dan

menempatkan diri pada posisi yang berlawanan dengan pemerintah maupun aparat penegak hukum. Apa yang oleh mereka dinilai tidak sesuai dengan harapan, segera dipublikasi dan dilemparkan sebagai penindasan, ketidak-adilan, mafia peradilan, korupsi, kolusi, nepotisme dan lain-lain sebagainya. Kesemuanya ini merupakan tantangan tugas tersendiri bagi petugas Polri yang merupakan bumper aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system).

Sementara itu, keberhasilan pembangunan nasional telah menjadikan sikap, cara berpikir dan perilaku masyarakat menjadi lebih modern, lebih kritis, lebih berorientasi pada kepentingan serta tingkat kepercayaan pada informasi media massa semakin tinggi.

Gambaran masyarakat seperti itu memiliki harapan-harapan (expectation) yang semakin meningkat dan beragam. Penjelasan-penjelasan pemerintah harus diberikan dalam kerangka logika berpikir mereka. Mereka tidak lagi mempan ditakut-takuti oleh kekuasaan dan mitos, mereka lebih rasional; namun mudah dimanfaatkan bagi timbulnya desas-desus dan kerusuhan seperti apa yang telah kita saksikan di berbagai daerah.

Dengan gambaran masyarakat yang demikian itu, kepolisian memerlukan kualitas personil dan organisasi yang tidak semata-mata bertindak berdasarkan undang-undang, tetapi

lebih mempertimbangkan kepentingan pengendalian sosial. Gaya pemolisian seperti itu oleh Satjipto Raharjo disebutkan sebagai gaya *protagonistis*. Gaya yang berpihak kepada kepentingan masyarakat banyak; yang menuntut petugas yang kreatif, di dalam menentukan pilihan-pilihan cara bertindak menyelesaikan masalah/ketegangan sosial yang timbul.

Mencermati situasi terakhir ini, Polri dalam menangani masalah-masalah Kamdagri semakin memperoleh tantangan. Mereka dituntut memiliki kemampuan *menindak* sambil *mengayomi* demi tegaknya hukum dan ketertiban. Mereka harus mampu *menerbitkan* tanpa terkesan *mengusik*; bahkan harus bisa melayani kepentingan masyarakat tanpa merepotkan apalagi merugikan.

Di dalam GBHN 1998, terakomodasi masalah HAM pada sektor hukum. Polri dituntut untuk lebih berhati-hati dalam menerapkan kewenangan penangkapan, penyitaan dan tindakan-tindakan kekerasan lainnya. Polri nantinya akan dimintai pertanggungjawaban tindakannya (akuntabilitas) secara hukum.

Tugas, Fungsi dan Peranan Polri

Sebelum sampai pada uraian tuntutan kualitas profesionalisme dan kejuangan Polri, dalam menghadapi tantangan tugas tersebut di atas, perlu kiranya kita segarkan ingatan kita tentang konsepsi tugas, fungsi dan peranan Polri pada abad ke-21 mendatang. Dapat dipastikan bahwa tu-

gas, fungsi dan peranan Polri akan tetap dilandasi oleh nilai-nilai yang terkandung di dalam Tribrata dan Catur prasetya, sekalipun terjadi perkembangan-perkembangan masyarakat ke arah yang lebih maju. Dengan demikian, tugas Polri akan tetap melibat masalah tegaknya hukum dan ketertiban, terwujudnya ketentraman masyarakat; yang merupakan sendi-sendi stabilitas Kamtibmas.

Dalam kaitan ini, hendaknya dipahami bahwa fungsi penegakan hukum meskipun masih paralel dengan Bin Kamtibmas namun sebenarnya tidaklah sama dan sebangun. Kalau penegakan hukum bertujuan keadilan dan kepastian hukum, maka Bin Kamtibmas ingin menyentuh aspek-aspek yang lebih mendalam, yakni penangkalan sejak dini akar-akar pelanggaran hukum yang kita kenal sebagai faktor korelatif kriminogen (FKK). Tujuan Bin Kamtibmas adalah pengendalian sosial yang lebih mengutamakan ketertiban. Dalam penguasaan di lapangan kedua fungsi ini tidak selalu sejalan; bahkan kadangkala berlawanan; sehingga menempatkan petugas polisi pada dilemma. Pendekatan Bin Kamtibmas lebih bergaya *protagonistis*; sementara pendekatan penegakan hukum yang kaku lebih bergaya mempertahankan *statusquo*. (Satjipto Rahardjo: 1947).

Sementara itu, peranan petugas Polri sebagai penegak hukum jalanan, cukup dilemmatis. Niat baik dan sikap Polri untuk menjadi *pengayom*

cenderung menggulir menjadi *penindas* pada suatu aksi unjuk rasa atau kerusuhan massa. Karena polisi melakukan pengayoman dengan menerapkan cara-cara bertindak yang *halus* (persuasif) sampai pada cara-cara yang *paling keras* (repressif). Peranan Polri selaku *penertib*; kadangkala bergulir menjadi *pengusik*. Kelewat rajinnya petugas polisi dalam menertibkan pedagang kaki lima, pelanggar lalu lintas sering terkesan menjadi *pengusik* masyarakat. Demikian pula terhadap peranan sebagai *pelayan masyarakat* dalam kondisi sarana, peralatan dan dana yang amat terbatas cenderung menjadikan petugas *dilayani* oleh warga masyarakat; karena semua kebutuhan disiapkan oleh warga yang berurusan dengan polisi tersebut. Hal ini menjadikan kesan bahwa polisi bukannya *pelayan* tapi justru *majikan*.

Demikianlah kenyataan-kenyataan yang terus bergulir yang membantu konsepsi keliru terhadap Polri yang tentunya memerlukan pelurusan, penjernihan melalui kualitas profesionalisme dan kejuangan yang handal seiring perkembangan dan dinamika masyarakat.

Berbeda dengan angkatan perang, Polri tidak mungkin mampu menunaikan tugas, fungsi dan perannya secara baik hanya dengan membangun *kekuatan* dan *kemampuan* saja. Kedua piranti itu masih perlu dilengkapi dengan piranti *dasar hukum*, piranti *wewenang*, *pengendalian wewenang* dan *wibawa*.

Dalam dunia kepolisian, pembangunan kekuatan dikaitkan dengan perbandingan tertentu dengan warga masyarakat yang dilayani (police employee ratio). Di Indonesia perbandingan itu masih berkisar 1:1148; sementara di negara-negara maju ada yang menganut perbandingan 1:750; 1:500, bahkan ada yang 1:350. Di samping itu, kekuatan Polri tergelar 24 jam sehari tanpa mengenal hari libur: di 27 propinsi seluruh Indonesia.

Seirama dengan pembangunan kekuatan ini, pembangunan kemampuan penegakan hukum meliputi 3 (tiga) golongan kemampuan utama yaitu: *kemampuan penyidikan, kemampuan penertiban, dan kemampuan penindakan*. Dewasa ini kemampuan-kemampuan tersebut berpusat pada pembinaan Koserse untuk kemampuan penyidikan, Direktorat Samapta dan Lalu-lintas untuk kemampuan penertiban, dan Korp Brimob untuk kemampuan penindakan. Tiap-tiap golongan kemampuan utama itu dibagi lagi menjadi kemampuan-kemampuan yang lebih terspesialisasi. Kesemuanya ini akan berkaitan dengan kualitas profesionalisme Polri.

Selain 2 piranti ini, diperlukan dasar hukum pada tingkatan undang-undang, agar kekuasaan kepolisian tidak tergelincir pada perlindungan kelompok untuk menindas kelompok lain. Juga diperlukan piranti wewenang yang diatur dalam KUHAP serta perundang-undangan lainnya. Agar

wewenang itu tidak digunakan secara sewenang-wenang, maka Polri juga perlu membangun piranti pengendalian kewenangan, baik dalam wujud kode etik Polri, lembaga disiplin serta lembaga praperadilan maupun PTUN. Akhirnya Polri perlu melengkapi diri dengan piranti wibawa; yang bertumpu kredibilitas dan reputasi tiap unit kerjanya. Kiranya menjaga citra Polri tidak lagi relevan di abad keterbukaan ini, karena perbuatan segelintir oknum Polri akan mencerminkan bagian terbesar dari anggota yang baik dan bertugas tanpa mengenal lelah memelihara Kamtibmas. Demikianlah beberapa konsepsi tentang tugas, fungsi dan peranan Polri yang perlu dipahami dalam kaitan meningkatkan kualitas profesionalisme dan kejuangan yang diperlukan pada abad XXI mendatang.

Tuntutan Kualitas Profesionalisme

Setelah menguraikan tantangan tugas yang dihadapi Polri pada abad ke XXI, kemudian telah disinggung pula sekilas tentang pemahaman tugas, fungsi, dan peranan Polri pada masa itu, maka sampailah kita pada pembahasan tuntutan kualitas profesionalisme dan kejuangan yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan tugas tersebut.

Sesuai dengan ciri-ciri abad XXI sebagaimana telah diulas oleh banyak pakar, maka kualitas profesionalisme dan kejuangan Polri yang mampu memelihara situasi Kamtibmas pada bentangan masa tersebut, secara

BERITA KAMPUS

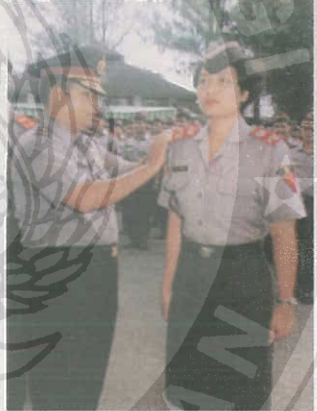
GLADI POSKO POLRI



Perwakilan mahasiswa/wi melapor kepada Wagub PTIK untuk disemati tanda peserta gladi Posko.



Peserta gladi sedang mendiskusikan persoalan yang baru diterima dari Wasdal.



Wagub PTIK, Brigjen Pol. Drs. J.D. Sitorus MSC menyematkan tanda peserta gladi Posko kepada perwakilan mahasiswa/wi.



Peserta gladi Posko sedang mempelajari petunjuk pelaksanaan gladi Posko.



Peserta gladi Posko sedang mendiskusikan persoalan yang harus dijawab.

SEMINAR SEHARI TENTANG DISINTEGRASI MASYARAKAT



Kapalri memberi sambutan pada Seminar Sehari tentang Disintegrasi Masyarakat.



Letjen Pol (P) Drs. Soejuoed Binwalijoe sebagai moderator pada Seminar Sehari tentang Disintegrasi Masyarakat.



Wakapalri Letjen Pol. Drs. Nana Permana menyampaikan kenang-kenangan kepada para penyaji.



Para Pejabat teras Mabes Polri, dari kiri ke kanan: Asops Kapalri Mayjen Pol. Drs. Bimantoro, Asbimmas Kapalri Mayjen Pol. Drs. Yuyun M., Asrena Kapalri Mayjen Pol. Drs. Adang Dorodjatun, Dan Koserse Mayjen Pol. Drs. Da'i Bahtiar, Aslog Kapalri Mayjen Pol. Drs. Suprijadi AR.



Dekan PTIK Prof. Dr. Awaloedin Djamin, MPA, menyampaikan kenang-kenangan kepada Prof. Dr. Sardjono Jatiman, SH.



Dekan PTIK Prof. Dr. Awaloedin Djamin, MPA menyampaikan kenang-kenangan kepada penyaji Prof. Parsoedi Soeparlan, PhD.



Polwan PTIK sebagai pasukan Jajad Kehormatan, menerima kunjungan Kapolri.

SARASEHAN HAM



Wimar Witular selaku moderator Sarasehan HAM, no. 3 dari kanan.



Waktu rehat pada Sarasehan HAM dari kiri ke kanan: Dekan PTIK Prof. Dr. Awaloedin Djamin MPA; Wimar Witular; Gub PTIK Mayjen Pol. Drs. Ahwil Sutan SH, MBA, MM; Rektor Ubhara, Mayjen Pol. Drs. Koesparmono Irsan SH, MBA, MM.



Para peserta Sarasehan HAM.



Pertanyaan dari salah satu floor.



Mahasiswa PTIK sedang mengikuti Sarasehan HAM.